

## Analisis Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Mitigasi Risiko Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Bpkd Kabupaten Gowa)

Sitti Aliyah<sup>1)\*</sup>, Ismail Rasulong<sup>2)</sup>, Asriani Hasan<sup>3)</sup>

<sup>1)\*2)3)</sup> Akuntansi, Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar  
<sup>1)\*</sup> [sittialiyah54@gmail.com](mailto:sittialiyah54@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tingginya risiko kecurangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang masih menjadi persoalan serius di sektor publik. Lemahnya penerapan pengendalian internal, keterbatasan peran audit internal, serta rendahnya kesadaran dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengendalian internal dalam memitigasi risiko kecurangan pada pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa, serta mengkaji peran audit internal dan kesadaran *anti-fraud* dalam mendukung sistem tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pejabat dan pegawai yang terlibat langsung dalam pengelolaan serta pengawasan keuangan daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal di BPKD Kabupaten Gowa telah diterapkan sesuai regulasi, namun efektivitasnya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya manusia, konsistensi pelaksanaan prosedur, dan beban kerja yang tinggi. Audit internal dan kesadaran *anti-fraud* terbukti berperan penting dalam memperkuat pengendalian internal dan menekan risiko kecurangan. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa sinergi antara pengendalian internal, audit internal, dan kesadaran *anti-fraud* menjadi kunci dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah.

**Kata kunci:** Pengendalian Internal, Audit Internal, Kesadaran *Anti-Fraud*, Risiko Kecurangan

### Abstract

*This study is motivated by the high risk of fraud in local government financial management, which remains a significant issue in the public sector. Weak internal control implementation, limited effectiveness of internal audit, and low anti-fraud awareness may create opportunities for financial misconduct. This research aims to analyze the effectiveness of internal control in mitigating fraud risk in local financial management at the Regional Financial Management Agency (BPKD) of Gowa Regency, as well as to examine the role of internal audit and anti-fraud awareness in supporting the internal control system. The study employs a descriptive qualitative approach, with data collected through in-depth interviews, observation, and documentation. Key informants include officials and staff directly involved in financial management and oversight processes. The findings indicate that internal control at BPKD Gowa Regency has been implemented in accordance with existing regulations; however, its effectiveness has not been fully optimized due to limitations in human resources, inconsistencies in procedural implementation, and high workload pressures. Internal audit and anti-fraud awareness play a crucial role in strengthening internal control and reducing fraud risk. This study concludes that strong synergy among internal control, internal audit, and anti-fraud awareness is essential to enhance accountability, transparency, and integrity in local government financial management.*

**Keywords:** Internal Control, Internal Audit, Anti-Fraud Awareness, Fraud Risk

### 1. PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah menjadi elemen penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berfokus pada kepentingan masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, pengelolaan keuangan daerah masih berpotensi menghadapi berbagai bentuk risiko

kecurangan (*fraud*), seperti penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, hingga tindak korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dan merusak integritas pelayanan publik. Secara nasional, fenomena kecurangan di sektor publik masih menjadi persoalan serius.

Data *Indonesian Corruption Watch* (2023) mencatat terdapat 2.249 terdakwa kasus korupsi sepanjang tahun 2022, dan pemerintah daerah menempati posisi tertinggi sebagai latar belakang pekerjaan para terdakwa tersebut. Temuan tersebut menunjukkan bahwa tingkat risiko dalam pengelolaan keuangan daerah masih tergolong tinggi sehingga memerlukan perhatian dan pengawasan yang lebih serius. Fenomena ini sekaligus menegaskan bahwa upaya pencegahan kecurangan pada sektor pemerintahan daerah perlu diperkuat melalui mekanisme pengendalian yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

Pada konteks internasional, Boufounou dkk (2024), menemukan bahwa kelemahan pengendalian internal seperti fragmentasi prosedur, keterbatasan sumber daya manusia, serta lemahnya praktik audit internal dapat menghambat transparansi keuangan dan efisiensi operasional. Sebaliknya, penguatan pengendalian internal terbukti menjadi instrumen penting dalam mitigasi korupsi dan pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Penerapan pengendalian internal yang efektif juga sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antar pegawai, kepemimpinan manajerial, serta budaya kepatuhan yang terbentuk dalam organisasi. Organisasi sektor publik sering menghadapi tantangan berupa rendahnya *sense of ownership* terhadap tugas, sehingga sebagian pegawai hanya menjalankan pekerjaan berdasarkan instruksi, bukan berdasarkan pemahaman tentang pentingnya kontrol. Kondisi ini berdampak pada lemahnya deteksi dini terhadap kesalahan ataupun ketidaksesuaian prosedur.

Penelitian Indriani & Mulyany, (2024) menegaskan bahwa lemahnya penerapan pengendalian internal dapat meningkatkan risiko korupsi dan penyalahgunaan anggaran publik akibat rendahnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan konsep *Fraud Triangle*, yang menjelaskan bahwa tekanan, peluang, dan rasionalisasi menjadi pemicu terjadinya *fraud* dalam organisasi sektor publik. Meskipun sebagian besar pemerintah daerah telah mengadopsi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), namun belum seluruh proses operasional terintegrasi secara *real-time*. Keterbatasan integrasi sistem dapat menyulitkan pelacakan transaksi dan melemahkan audit trail, sehingga membuka peluang terjadinya *fraud* berbasis rekayasa data yang tidak terdeteksi secara cepat.

Sejumlah temuan resmi turut menggambarkan permasalahan tersebut. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2023, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat 11.945 temuan ketidakpatuhan serta masih ditemukannya berbagai kelemahan dalam sistem pengendalian internal pada pemerintah daerah di berbagai wilayah Indonesia. Di wilayah Sulawesi Selatan, BPK juga menemukan adanya kelebihan bayar dan ketidaksesuaian prosedur belanja modal pada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk pengelolaan kas dan aset daerah. Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal telah dibentuk secara struktural, implementasinya belum sepenuhnya efektif (Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, 2023).

Penelitian Bulan dkk (2017), juga menegaskan bahwa implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) yang baik akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik pelaksanaan SPIP, semakin kuat pula kemampuan organisasi dalam mengendalikan kelemahan administratif dan memitigasi risiko kecurangan. Efektivitas pengendalian internal di BPKD Gowa menjadi sangat penting mengingat lemahnya pengendalian pada satu tahapan saja dapat menimbulkan dampak sistemik pada akuntabilitas keuangan daerah.

Implementasi SPIP yang baik tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tetapi juga mencerminkan kedewasaan tata kelola organisasi dalam membangun sistem pertanggungjawaban publik. Pemerintah daerah yang memiliki SPIP kuat akan lebih mampu mencegah terjadinya pemborosan, penyimpangan anggaran, dan potensi moral hazard dari aparatur. Selain itu, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) berperan sebagai instrumen manajemen risiko yang

mendukung organisasi dalam mengenali berbagai potensi masalah sebelum menimbulkan kerugian lebih besar.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Pengendalian Internal

Pengendalian internal dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang disusun untuk memberikan tingkat keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Tujuan tersebut terutama berkaitan dengan tercapainya efektivitas kegiatan operasional, keandalan informasi pelaporan keuangan, serta kepatuhan terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Secara umum, sasaran pengendalian internal meliputi tiga dimensi utama, yaitu keandalan pelaporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan regulasi, serta efektivitas dan efisiensi pelaksanaan operasional. (Salsabiila & Wafa, 2025). Pengendalian internal memiliki peran strategis disektor publik dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.

### 2. *Fraud* dan Risiko Kecurangan

*Fraud* atau kecurangan adalah Tindakan penipuan yang disengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara merugikan orang lain (Tunggal, 2016). Kecurangan (*fraud*) ada 3 bentuk utama, yaitu penyalahgunaan atau penggelapan aset, kecurangan laporan keuangan dan korupsi, (Wells, 2024). Penyalahgunaan aset merupakan kasus yang paling sering terjadi (89%), meskipun dampak kerugian relatif lebih kecil dibandingkan dengan kecurangan laporan keuangan yang memiliki nilai kerugian terbesar (Association of Certified Fraud Examiners, 2022).

### 3. Teori *Fraud Triangel*

Teori *fraud Triangel* yang dikemukakan Cressey (1953) dalam (Tuanakotta, 2016), menyebutkan bahwa kecurangan terjadi karena adanya tiga faktor, yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*). Tekanan dapat bersumber dari tuntutan ekonomi maupun pencapaian target kinerja tertentu. Kesempatan untuk melakukan kecurangan timbul akibat kelemahan dalam sistem pengendalian internal, sementara rasionalisasi merujuk pada upaya pelaku dalam membenarkan secara moral tindakan penyimpangan yang dilakukan.

### 4. Audit Internal

Audit internal merupakan aktivitas independen yang memberikan jaminan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai serta meningkatkan operasi organisasi. Audit internal berperan dalam mengevaluasi efektivitas pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan serta mendeteksi indikasi kecurangan sejak dini. Menurut Sukrisno Agoes (2017), Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik, audit internal bertujuan menilai efektivitas sistem pengendalian internal, kualitas pelaporan, serta kepatuhan terhadap kebijakan. Agoes menjelaskan bahwa auditor internal memiliki peran strategis sebagai pemberi jaminan dan konsultasi yang membantu manajemen meningkatkan tata kelola organisasi. Audit internal juga berperan dalam mendeteksi indikasi *fraud* melalui pendekatan pemeriksaan berbasis risiko.

### 5. Kesadaran *Anti Fraud*

Kesadaran *anti-fraud* adalah upaya menumbuhkan budaya kerja yang jujur, beretika tinggi dan peduli terhadap risiko kecurangan dalam organisasi. Menurut Albrecht, kesadaran *anti-fraud* menjadi fondasi yang penting dalam pencegahan kecurangan karena menyangkut nilai moral individu dalam organisasi. Kesadaran *anti-fraud* dapat memicu kepekaan seluruh anggota organisasi terhadap risiko *fraud* dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan. Arpani dkk (2022), menambahkan bahwa kesadaran *anti-fraud* dipengaruhi oleh lingkungan organisasi yang kondusif dan kepemimpinan yang memberi teladan.

## 3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sugiyono

(2019), menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengkaji objek penelitian dalam kondisi yang bersifat alamiah, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan data. Analisis data dilakukan secara induktif, serta hasil penelitian lebih menitikberatkan pada pemaknaan terhadap fenomena yang diteliti dibandingkan dengan upaya generalisasi.

Pendekatan deskriptif dipilih karena penelitian ini diarahkan untuk menyajikan gambaran yang mendalam mengenai efektivitas pengendalian internal dalam mitigasi risiko kecurangan pada pengelolaan keuangan daerah, khususnya pada BPKD Gowa. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha mengungkap bagaimana pengendalian internal diterapkan, bagaimana audit internal dilaksanakan, serta bagaimana kesadaran *anti-fraud* terbentuk, sehingga dapat dipahami peran ketiga variabel tersebut dapat mencegah *fraud* (Sugiyono, 2017).

Menurut Creswell (2018), pendekatan kualitatif deskriptif sangat sesuai digunakan untuk meneliti fenomena sosial yang kompleks, karena memungkinkan peneliti menggali makna secara kontekstual dari perspektif para partisipan. Dengan demikian, metode ini memberikan fleksibilitas dalam memahami keterkaitan antar fenomena yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan angka atau perhitungan statistik. Pemilihan metode ini juga memungkinkan peneliti menemukan pola-pola baru yang muncul dilapangan, yang dapat memperkaya literatur terkait pengendalian internal dan pencegahan *fraud*.

### 3.1. Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan	Kode
1.	Yusuf, SE, MM	Sekretaris Badan	YS
2.	Hasnah, SE, MM	Auditor Internal	HS
3.	Emil Wiradinata, SE	Kepala Bidang Anggaran	EW
4.	Andryani Hasan, SE,M.Ak	Kepala Bidang Akuntansi	AH

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data. Reduksi data dipilih karena penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang menghasilkan beragam jenis data. Agar analisis tetap terarah diperlukan proses pemilahan dan penyederhanaan data sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Pengumpulan data  
Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi yang relevan dengan pengendalian internal dan mitigasi risiko kecurangan pada BPKD Kabupaten Gowa
2. Reduksi data  
Tahap selanjutnya adalah melakukan pemilahan data dengan memilih informasi yang relevan sesuai dengan fokus penelitian.
3. Penyajian data  
Data hasil reduksi selanjutnya disusun dalam bentuk uraian naratif dan tabel agar pola keterkaitan antar temuan dapat dipahami dengan lebih jelas
4. Penarikan kesimpulan dan verifikasi  
Kesimpulan ditarik berdasarkan temuan yang telah dianalisis dan diverifikasi secara berkelanjutan melalui triangulasi agar valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

## 4. PEMBAHASAN

### 4.1 Peran Audit Internal dan Kesadaran *Anti-Fraud* dalam Mendukung Sistem Pengendalian Internal di BPKD Kabupaten Gowa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal memiliki peran yang signifikan dalam mendukung sistem pengendalian internal di BPKD Kabupaten Gowa. Audit internal yang dilaksanakan oleh Inspektorat berfungsi sebagai mekanisme pengawasan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peran ini sejalan dengan konsep pengendalian internal yang menekankan pentingnya fungsi pengawasan independen dalam mencegah dan mendeteksi potensi penyimpangan.

Komitmen pimpinan daerah menjadi faktor awal yang menentukan arah kebijakan pengendalian internal. Dalam konteks ini, BPKD tidak menetapkan kebijakan pengendalian secara mandiri, melainkan mengikuti arahan pimpinan daerah. Kondisi tersebut mencerminkan bahwa sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintah daerah bersifat terpusat dan hirarkis, di mana dukungan pimpinan menjadi prasyarat utama bagi efektivitas pengendalian. Hal ini sejalan dengan konsep *control environment* yang menempatkan komitmen pimpinan sebagai fondasi utama dalam sistem pengendalian internal.

Komitmen pimpinan juga tercermin dalam upaya memastikan seluruh kebijakan pengelolaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku guna meminimalkan potensi kecurangan.

Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Informan YS yang menyatakan: "Kebijakan pengendalian internal di BPKD pada dasarnya mengikuti arahan dan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan daerah. Penetapan kebijakan internal tidak dilakukan secara mandiri oleh unit kerja, melainkan harus melalui proses persetujuan pimpinan daerah." (YS, Wawancara 22/12/2025)

Berdasarkan keterangan informan, kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan daerah menjadi acuan utama bagi BPKD dalam menjalankan fungsi pengelolaan keuangan. Dengan adanya mekanisme persetujuan berjenjang tersebut, setiap kebijakan pengendalian internal yang diterapkan memiliki legitimasi formal dan mengikat seluruh pegawai. Kondisi ini menunjukkan bahwa peran pimpinan tidak hanya sebatas pemberi arahan, tetapi juga sebagai penentu arah pelaksanaan pengendalian internal di lingkungan BPKD Kabupaten Gowa.

Pelaksanaan audit internal yang dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan juga memperkuat fungsi pengendalian internal. Pendekatan audit berbasis risiko yang diterapkan menunjukkan bahwa pengawasan difokuskan pada area-area yang memiliki tingkat kerawanan kecurangan lebih tinggi, seperti pengadaan barang dan jasa. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa audit internal tidak hanya berfungsi sebagai alat pemeriksaan kepatuhan, tetapi juga sebagai instrumen mitigasi risiko kecurangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan HS, pelaksanaan audit internal dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan melalui program kerja tahunan yang disusun oleh Inspektorat. "Pelaksanaan audit internal dilakukan dengan mengacu pada program kerja tahunan yang telah disusun oleh Inspektorat." (HS, Wawancara 08/01/2026)

Tindak lanjut atas hasil audit menjadi elemen penting dalam mendukung efektivitas pengendalian internal. Rekomendasi yang diberikan oleh auditor internal berfungsi sebagai sarana perbaikan atas kelemahan yang ditemukan. Apabila tindak lanjut dilakukan secara konsisten, maka potensi terulangnya kecurangan dapat diminimalkan. Dengan demikian, audit internal tidak hanya berperan dalam menemukan penyimpangan, tetapi juga dalam mendorong perbaikan sistem secara berkelanjutan.

Kesadaran *anti-fraud* pegawai turut mendukung berjalannya pengendalian internal. Meskipun sebagian kecurangan terjadi akibat kurangnya pemahaman terhadap aturan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran terhadap risiko kecurangan relatif telah terbentuk. Namun, kesadaran tersebut masih memerlukan penguatan melalui pembinaan dan sosialisasi berkelanjutan agar pengendalian internal dapat berjalan secara lebih preventif.

#### **4.2 Efektivitas Pengendalian Internal dalam Memitigasi Risiko Kecurangan pada Pengelolaan Keuangan Daerah di BPKD Kabupaten Gowa**

Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian internal di BPKD Kabupaten Gowa telah diterapkan dalam berbagai tahapan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Pemisahan fungsi dan pembagian tugas menjadi mekanisme utama dalam membatasi kewenangan individu, sehingga risiko terjadinya penyimpangan dapat ditekan. Praktik ini sejalan dengan prinsip pengendalian internal yang menekankan pemisahan tugas sebagai upaya pencegahan kecurangan. pemisahan fungsi ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi mekanisme pengendalian yang diterapkan secara nyata dalam aktivitas kerja sehari-hari. Setiap unit kerja menjalankan tugas sesuai kewenangannya, sehingga proses pengelolaan keuangan tidak terpusat pada satu individu atau satu bidang tertentu.

"Pembagian tugas itu sudah jelas, mulai dari kepala badan sampai staf, semuanya sudah diatur sesuai aturan dan peraturan daerah." (YS, Wawancara 22/12/2025).

Pemisahan fungsi memungkinkan adanya pengawasan internal secara alami antar unit kerja. Ketika satu unit melaksanakan perencanaan atau pelaksanaan kegiatan, unit lain bertugas melakukan pencatatan dan verifikasi, sehingga terdapat proses saling mengontrol dalam pengelolaan keuangan daerah. Mekanisme ini dinilai berperan dalam memperkecil peluang terjadinya penyimpangan karena setiap tahapan harus melalui lebih dari satu pihak.

Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) juga berkontribusi terhadap efektivitas pengendalian internal. Sistem ini membantu meningkatkan keteraturan pencatatan dan konsistensi data keuangan antarbidang. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan sistem aplikasi belum sepenuhnya menggantikan peran pengendalian manual. Verifikasi dokumen fisik tetap dilakukan sebagai langkah pengendalian tambahan untuk memastikan kesesuaian data dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan.

Pengawasan terhadap pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran menjadi aspek krusial dalam mitigasi risiko kecurangan. Keterlambatan laporan pertanggungjawaban berpotensi menimbulkan celah pengawasan yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan penyimpangan. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi dan permintaan laporan secara berkala menjadi bentuk pengendalian yang penting dalam memastikan penggunaan anggaran dapat dipantau secara berkelanjutan.

Pengendalian internal di BPKD Kabupaten Gowa dinilai telah berjalan dan memiliki peran dalam memitigasi risiko kecurangan. Namun, efektivitasnya masih sangat dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan prosedur dan kedisiplinan pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak hanya bergantung pada keberadaan aturan dan teknologi, tetapi juga pada perilaku individu yang menjalankannya.

#### **4.3 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Pengendalian Internal dalam Mencegah Terjadinya Kecurangan pada Pengelolaan Keuangan Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia menjadi faktor utama, mengingat pengelolaan keuangan daerah menuntut pemahaman yang memadai terhadap regulasi dan prosedur. Keterbatasan kompetensi auditor dan pengelola keuangan berpotensi mengurangi kemampuan pengendalian internal dalam mendeteksi risiko kecurangan secara dini.

"Kendalanya itu SDM, kompetensi kita itu terkadang masih dibanding dengan audit yang akan dilaksanakan." (HS, Wawancara 08/01/2026)

Kedisiplinan dan kepatuhan pegawai terhadap prosedur juga berperan penting dalam menentukan efektivitas pengendalian internal. Ketidakpatuhan terhadap jadwal dan ketentuan administrasi dapat melemahkan proses pengawasan dan memperlambat evaluasi. Dengan demikian, perilaku pegawai menjadi faktor pendukung yang tidak terpisahkan dari sistem pengendalian internal itu sendiri.

Perubahan regulasi dan kompleksitas aturan pengelolaan keuangan daerah turut memengaruhi konsistensi penerapan pengendalian internal. Penyesuaian terhadap regulasi baru memerlukan waktu dan pemahaman yang memadai agar tidak menimbulkan kesalahan administrasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa dinamika regulasi menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga efektivitas pengendalian internal. Perubahan regulasi yang terjadi di tengah proses pelaksanaan anggaran berpotensi menimbulkan kesalahan administrasi maupun ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini dapat membuka celah terjadinya kekeliruan yang pada akhirnya berisiko menimbulkan temuan dalam pemeriksaan. Oleh karena itu, kompleksitas aturan dan dinamika regulasi menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal, khususnya dalam menjaga konsistensi pelaksanaan prosedur di setiap tahapan pengelolaan keuangan. Berdasarkan temuan lapangan, keterbatasan dukungan teknis dan tenaga IT menyebabkan pemanfaatan teknologi belum sepenuhnya mampu mendeteksi potensi kecurangan secara otomatis. Kondisi ini membuat pengendalian internal masih sangat bergantung pada pemeriksaan manual dan pengawasan langsung.

Dengan demikian, efektivitas pengendalian internal dipengaruhi oleh sejauh mana teknologi dapat dimanfaatkan secara maksimal dan didukung oleh sumber daya yang memadai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan EW selaku Kepala Bidang Anggaran, perubahan regulasi yang terjadi secara berkala menuntut seluruh pengelola keuangan untuk terus menyesuaikan diri dengan ketentuan terbaru.

"Setiap tahun teman-teman pengelola keuangan itu harus beradaptasi terus, karena aturan sering berubah." (EW, Wawancara 22/12/2025)

Pemanfaatan teknologi informasi juga memengaruhi efektivitas pengendalian internal, meskipun masih menghadapi keterbatasan dukungan teknis. Ketergantungan pada pemeriksaan manual menunjukkan bahwa teknologi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai alat deteksi risiko secara otomatis. Oleh karena itu, peningkatan dukungan teknis dan kapasitas teknologi menjadi kebutuhan dalam memperkuat pengendalian internal.

Kesadaran pegawai terhadap risiko kecurangan dan pembinaan yang berkelanjutan menjadi faktor pendukung penting dalam mencegah terjadinya kecurangan. Pembinaan, pengawasan, dan tindak lanjut atas rekomendasi pemeriksaan berfungsi sebagai sarana evaluasi dan perbaikan sistem. Apabila seluruh faktor tersebut dapat dikelola secara terpadu, maka pengendalian internal di BPKD Kabupaten Gowa akan berfungsi lebih efektif dalam mencegah terjadinya kecurangan pada pengelolaan keuangan daerah.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektivitas pengendalian internal dalam memitigasi risiko kecurangan pada pengelolaan keuangan daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Gowa, dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal telah diterapkan dan berperan penting dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel. Pengendalian internal dibangun melalui komitmen pimpinan yang kuat, pengawasan berjenjang, serta kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku, sehingga membentuk lingkungan kerja yang menekankan disiplin dan kepatuhan aparatur.

Audit internal dan kesadaran *anti-fraud* memiliki peran signifikan dalam mendukung efektivitas pengendalian internal. Audit internal tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pemeriksaan formal, tetapi juga berperan secara preventif melalui pendekatan konsultatif, seperti *coaching clinic* dan bimbingan teknis. Kesadaran *anti-fraud* dibangun melalui keteladanan pimpinan dan pengawasan melekat, meskipun dalam praktiknya efektivitas pengendalian masih sangat bergantung pada konsistensi perilaku individu aparatur.

Efektivitas pengendalian internal di BPKD Kabupaten Gowa dapat dikatakan efektif secara prosedural, namun masih menghadapi tantangan secara operasional. Penerapan pemisahan fungsi, penggunaan sistem aplikasi keuangan (SIPD), serta mekanisme rekonsiliasi dan verifikasi manual berlapis mampu meminimalkan risiko kecurangan, khususnya pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran. Namun, tingginya ketergantungan pada verifikasi manual menunjukkan bahwa mitigasi risiko masih bersifat detektif dan sangat dipengaruhi oleh kompetensi sumber daya manusia.

Faktor utama yang memengaruhi efektivitas pengendalian internal meliputi kompetensi sumber daya manusia, dukungan teknologi pengawasan, dan budaya kerja organisasi. Keterbatasan kompetensi akuntansi, belum optimalnya pemanfaatan teknologi audit, serta rendahnya kedisiplinan dalam pelaporan menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas pengendalian internal secara menyeluruh.

Pengendalian internal di BPKD Kabupaten Gowa telah berjalan dan mendukung upaya mitigasi risiko kecurangan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek operasional agar dapat mencapai efektivitas yang lebih optimal dan berkelanjutan

## DAFTAR PUSTAKA

Arpani, M. L., Silfi, A., & Anggraini, L. (2022). Pengaruh whistleblowing system, kompetensi aparatur dan kesadaran Anti kecurangan terhadap pencegahan kecurangan ( Studi

- Empiris Pada OPD Kota Pekanbaru Provinsi Riau ). 2(1), 34–44.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2022). Report to the Nations;2022 Global Study on Occupational Fraud and Abuse Examiners (ACFE). In ACFE Global Report (Vol. 13, Nomor 2). <https://doi.org/10.1177/004051754201300201>
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023.
- Boufounou, P., Eriotis, N., Kounadeas, T., Argyropoulos, P., Pouloupoulos, J., Ekonomi, D., Ekonomi, F., Nasional, U., Bisnis, D. A., Ekonomi, F., & Nasional, U. (2024). Peningkatan Mekanisme Pengendalian Internal di Pemerintah.
- Bulan, S. G. I., Tinangon, J. J., & Mawikere, L. (2017). Pengaruh Kualitas Pengelola Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Pemerintah Kota Manado. *Going Concern : Jurnal Riset Akuntansi*, 12(01), 263–271. <https://doi.org/10.32400/gc.12.01.17214.2017>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan campuran* (Edisi 5). Pustaka Belajar.
- Indriani, M., & Mulyany, R. (2024). Enhancing fraud prevention and internal control : the key role of internal audit in public sector governance. *Cogent Business & Management*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2382389>
- Salmaa Salsabiila, & Zaenal Wafa. (2025). Analisis Sistem Pengendalian Internal, Internal Audit, Dan Kesadaran *Anti-Fraud* Terhadap Pencegahan Fraud Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 5(2), 373–383. <https://doi.org/10.55606/jaemb.v5i2.6875>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Edisi Revi). Alfabeta:Bandung.
- Sukrisno Agoes. (2017). *Auditing: Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik* (5th ed.). Salemba Empat.
- Tuanakotta, T. . (2016). *Fraud Auditing*. Salemba Empat.
- Tunggal, A. W. (2016). *Internal Control: Pengendalian Intern dalam prespektif COSO*. Harvarindo.
- Wells, J. T. (2024). *Principles of Fraud Examination* (6th ed.). John Wiley & Sons.

### Biodata Penulis

**Sitti Aliyah**, Lahir di Tana Toraja pada 25 September 2004. Saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan Sarjana S1 pada program studi Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Makassar. Penulis saat ini berfokus pada penyelesaian studi dan penyusunan tugas akhir sebagai bagian dari pemenuhan persyaratan akademik.

**Ismail Rasulong**, Lahir di Mario pada 05 Oktober 1973. Saat ini beliau bekerja sebagai dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pendidikan formal yang telah ditempuh meliputi sarjana (S1) Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Makassar, Magister (S2) Manajemen di Universitas Muslim Indonesia, serta Doktor (S3) Manajemen di Universitas Muslim Indonesia.

**Asriani Hasan**, Lahir di Bulukumba pada 16 Februari 1989. Pendidikan S1 Akuntansi Universitas Hasanuddin, S2 Matematika Universitas Gadjadara, dan saat ini beliau bekerja sebagai dosen Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar.